

Petahana Berpotensi Besar Melanggar Aturan

SEMARANG - Petahana yang mencalonkan lagi dalam Pilkada 2017 berpotensi besar melakukan pelanggaran baik selama masa kampanye dan saat pencoblosan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta lebih meningkatkan pengawasan.

Pengamat Politik dari Universitas Diponegoro (Undip), Teguh Yuwono mengatakan, Bawaslu Jateng harus lebih meningkatkan pengawasan dalam Pilkada 2017 yang akan digelar Februari. Pengawasan dilakukan terutama di daerah-daerah yang memiliki calon petahana. "Potensi petahana melakukan pelanggaran lebih besar dibandingkan calon baru. Ini harus menjadi perhatian serius," ujarnya.

Menurut dia, calon dari petahana memiliki kekuatan lebih dibandingkan calon baru. Dalam sejumlah kasus banyak ditemukan Aparatur Sipil Negara (ASN) digerakkan untuk mendukung calon petahana dalam pilkada. "Hal ini cukup beralasan, karena banyak ASN yang takut ketika petahana tersebut maju lagi. Dukungan dan intervensi jelas ada, apalagi ASN takut bila posisinya tergeser," katanya.

Seperti diketahui, tujuh daerah akan menggelar pilkada serentak dan banyak petahana yang maju kembali. Seperti di Kota Salatiga, Jepara, serta Pati. "Bawaslu Jateng harus lebih optimal dan maksimal dalam melakukan pengawasan. Bawaslu harus aktif. Apalagi jika menemukan pelanggaran, Bawaslu punya kewenangan bisa mendiskualifikasi calon. Ini merupakan kekuatan baru yang harus dimaksimalkan," paparnya.

Aturan Main

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Teguh Purnomo mengatakan pihaknya terus melakukan pengawasan. Tim pemenangan diminta harus mengetahui aturan main dalam upaya melakukan pemenangan terhadap calonnya.

"Aturan main kampanye harus jadi landasan dalam mengadakan kegiatan tersebut. Pengawasan terus diperketat. Bahkan kami sudah meluncurkan pengawasan online," tuturnya.

Masih banyak jenis pelanggaran yang berpotensi bisa menjerat calon kepala daerah, seperti politik uang, dan pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai ketentuan.

Banyak aturan baru terkait dengan kampanye pada pilkada kali ini. Seperti contohnya pembuatan alat peraga kampanye bukan semata domain penyelenggara saja. "Alat peraga kampanye memungkinkan dibuat peserta pilkada. Begitu juga parpol juga diberikan kewenangan untuk APK yang dipasang," terang Teguh.(J8-90)